

**DEMOKRASI RELASIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: NEGOSIASI LEGITIMASI DAN FLUIDITAS PREFERENSI PEMILIH DI PEDESAAN INDONESIA**

**Didik Try Putra<sup>1</sup>, Mulia Jaya<sup>2</sup>, Dedi Epriadi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Muara Bungo

Email Korespondensi: didiktriputra@gmail.com

Email: didiktriputra@gmail.com

**ABSTRACT**

The incapacity of traditional electoral-behavioralist theories to sufficiently explain the increasingly fluid, relational, and socially negotiated dynamics of village politics is the source of this study. In the context of the 2026 Village Head Election (Pilkades) in Sepakat Bersatu Village, Tebo Regency, political preferences were found to develop through social interactions, interpersonal relationships, emotional closeness, group experiences, and moral recognition ingrained in daily village life rather than as stable and individual orientations as assumed in rational voter theories. The objectives of this study are to reinterpret village democracy as a setting for the creation of relational legitimacy, examine the dynamics of voter views, and explain how political legitimacy is socially formed within village communities. 110 respondents were chosen by simple random selection from a total of 965 registered voters as part of the study's quantitative approach. Election paperwork, field observations, and in-person structured surveys were used to gather data. The social elements influencing candidate legitimacy, voter preference fluidity, and political perception patterns were all examined using descriptive analysis. The results show that village political preferences are dynamic, flexible, and constantly changing as a result of changing social communication within small communities. Candidates' moral reputation, social proximity, interpersonal relationships, and level of involvement in daily community life all have a greater influence on their legitimacy than formal political platforms. Relational agreements that are ingrained in unofficial social networks, such as kinship relationships, religious communities, local leaders, and casual chats among villagers, are how village politics function. These results show that village democracy is a social space where political legitimacy is socially created, negotiated, and interpreted rather than just an administrative-electoral process. In theory, this study suggests a conceptual repositioning of relational democracy as a different way of looking at local governance in the Global South. The study contends that relational rationality, as opposed to strictly individualistic calculations, provides a better understanding of village voting behaviour. As a result, this study not only adds to the body of knowledge on voting behaviour and village democracy in Indonesia, but it also provides an epistemological challenge to the predominance of liberal-electoral and behavioralist viewpoints in modern governance studies.

Keywords: Relational democracy, Political legitimacy, Voting behavior, Village elections.

**ABSTRAK**

Studi ini berasal dari kegelisahan akademik tentang ketidakmampuan pendekatan behavioristik-elektoral klasik untuk menjelaskan dinamika politik masyarakat desa yang semakin relasional, dinegosiasikan secara sosial, dan semakin cair. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo Tahun 2026, preferensi politik masyarakat terbukti berkembang melalui percakapan sosial, hubungan interpersonal, kedekatan emosional, pengalaman kolektif, dan pengakuan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. preferensi politik masyarakat tidak berkembang secara stabil dan individual sebagaimana diasumsikan dalam teori pemilih rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemilih melihat hal-hal, menjelaskan bagaimana relasi sosial masyarakat desa menghasilkan legitimasi politik, dan menginterpretasikan demokrasi desa sebagai tempat di mana

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

152

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



legitimasi relasional dibuat. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei terhadap 110 responden, yang dipilih secara acak dari 965 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengumpulan data dilakukan melalui survei tatap muka, observasi lapangan, dan dokumentasi Pilkades. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi pola persepsi politik, keluwesan preferensi pemilih, dan elemen sosial yang membentuk legitimasi kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat desa berubah seiring dengan komunikasi sosial komunitas lokal. Pengalaman interpersonal kandidat, kedekatan sosial, reputasi moral, dan tingkat keterlibatan sosial mereka lebih penting daripada program politik formal. Jaringan sosial informal seperti keluarga, komunitas keagamaan, tokoh lokal, dan percakapan sehari-hari warga adalah tempat politik lokal bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi desa lebih dari sekadar proses elektoral administratif; itu adalah tempat di mana orang membuat, berbicara, dan memahami legitimasi politik. Secara teoritik, penelitian ini menawarkan reposisi konseptual tentang demokrasi relasional sebagai perspektif alternatif untuk studi governance lokal di Global South. Penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas relasional lebih cocok untuk memahami perilaku pemilih masyarakat desa daripada kalkulasi individualistik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas penelitian tentang perilaku memilih dan demokrasi desa di Indonesia, tetapi juga melakukan intervensi epistemologis terhadap dominasi perspektif behavioristik dan liberal-elektoral dalam studi governance modern.

**Kata kunci:** Demokrasi relasional, Legitimasi politik, Perilaku memilih, Pilkades.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo Tahun 2026, orientasi politik masyarakat desa tampak bergerak dalam ketidakstabilan yang sulit dijelaskan semata-mata melalui logika elektoral formal. Dukungan terhadap seorang kandidat dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat, seringkali sejalan dengan tempo percakapan sosial, kedekatan emosional, hubungan kekerabatan, pengalaman kolektif, dan bahkan persepsi moral masyarakat terhadap sosok kandidat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kandidat yang tampak dominan di awal fase justru kehilangan penerimaan sosialnya di akhir kontes. Sebaliknya, kandidat yang sebelumnya tidak terlalu penting mulai memperoleh legitimasi melalui intensifikasi komunikasi antarpribadi dan kedekatan sosial yang lebih besar dengan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa preferensi politik warga desa tidak berkembang sebagai orientasi yang sepenuhnya stabil, rasional, dan individual seperti yang diasumsikan dalam banyak studi perilaku pemungutan suara klasik, melainkan sebagai orientasi sosial yang terus bergerak dan dinegosiasikan dalam kehidupan kolektif warga desa..

Fakta ini terbukti dalam proses Pilkades Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi 2026. Desa ini memiliki 965 pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari tiga dusun: Dusun Kembang Sari, Dusun Giri Rejo, dan Dusun Kodra Jadi Mulya. Opini politik dibentuk melalui percakapan informal, jaringan keluarga, hubungan ketetanggaan, komunitas keagamaan, dan komunikasi antaraktor lokal, karena struktur sosial masyarakat desa masih ditandai oleh intensitas hubungan interpersonal. Dalam hal ini, pilihan politik masyarakat tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh program pembangunan kandidat, sebaliknya, itu dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat melihat figur kandidat dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi interpersonal dan interaksi sosial sangat memengaruhi orientasi politik masyarakat lokal dan legitimasi kandidat (Amalia et al., 2025).

Situasi ini menimbulkan masalah akademik yang signifikan. Mengapa preferensi politik masyarakat desa dapat berkembang dengan cepat meskipun arena kompetisi, struktur kandidat, dan metode elektoral tidak berubah secara signifikan? Mengapa legitimasi kandidat dalam Pilkades sering kali lebih ditentukan oleh hubungan sosial, komunikasi, dan pengakuan masyarakat daripada program politik formal yang mereka tawarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa behaviorisme elektoral tidak dapat menjelaskan sepenuhnya dinamika politik desa. Pendekatan ini terlalu menganggap pemilih sebagai

individu yang rasional dan stabil. Faktor kepercayaan hubungan, komunikasi sosial, dan persepsi kolektif yang berkembang dalam komunitas lokal semakin memengaruhi orientasi politik masyarakat, menurut studi terbaru tentang perilaku memilih dalam pemilu lokal (Nasir, 2026; Sakinah & Supratiwi, 2026). Dalam banyak studi politik lokal di Indonesia, Pilkades masih dianggap sebagai arena demokrasi prosedural. Ini dijelaskan oleh faktor administratif seperti partisipasi politik, politik uang, mobilisasi elite, strategi kampanye, dan perilaku pemilih masyarakat. Metode ini benar-benar membantu menjelaskan bagaimana kompetisi politik lokal berkembang. Walau bagaimanapun, individualisme metodologis memandang pemilih sebagai aktor rasional yang menentukan pilihan politik berdasarkan kalkulasi kepentingan pribadi mereka. Studi-studi ini terus berangkat dari asumsi ini. Akibatnya, perubahan dalam orientasi politik komunitas desa sering kali direduksi menjadi fluktuasi elektoral biasa.

Padahal, dalam realitas empiris yang sebenarnya, perubahan persepsi sosial dan legitimasi relasional yang dihasilkan oleh kehidupan komunitas lokal adalah yang sebenarnya. Studi kontemporer tentang politik lokal menunjukkan bahwa, lebih dari kalkulasi rasional yang sepenuhnya individual, legitimasi politik dibentuk oleh persepsi sosial, kedekatan emosional, dan hubungan sosial kandidat dengan masyarakat. Dalam tradisi perilaku pemilihan klasik, keputusan politik dianggap sebagai hasil pertimbangan logis seseorang terhadap keuntungan politik tertentu (Downs, 1957). Pengaruh identitas sosial, segmentasi kelompok, dan demografi masyarakat digunakan dalam pendekatan sosiologis untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun, studi politik kontemporer menunjukkan bahwa komunikasi sosial, pengaruh interpersonal, persepsi publik, dan kedekatan emosional yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat semakin memengaruhi orientasi politik masyarakat (Moffitt, 2022).

Hubungan sosial di masyarakat desa sangat intim, sehingga preferensi politik berkembang melalui jaringan sosial masyarakat daripada secara individual. Menurut studi tentang dinamika jaringan sosial masyarakat dalam pemilu lokal, keterlibatan kandidat dalam jaringan sosial masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan legitimasi politik dan orientasi pemilih (Amalia et al., 2025). Studi governance dan demokrasi lokal mulai menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya dibentuk oleh undang-undang dan institusi formal, tetapi juga penerimaan sosial masyarakat terhadap figur politik tertentu (Bevir, 2023). Oleh karena itu, politik lokal terbentuk bukan hanya melalui proses administratif-elektoral, tetapi juga melalui makna sosial yang diciptakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemampuan kandidat untuk berkomunikasi dengan orang lain, membentuk kedekatan sosial, keterlibatan sosial dalam masyarakat desa, dan citra pribadi mereka membentuk persepsi masyarakat terhadap kandidat.

Dalam situasi seperti ini, legitimasi politik lokal lebih mirip dengan hasil perundingan sosial daripada konsekuensi formal dari proses elektoral. Studi terbaru tentang komunikasi pemilihan lokal menemukan bahwa keterlibatan emosional dan visibilitas politik sangat berpengaruh pada penerimaan publik terhadap kandidat lokal (Pahrudin et al., 2026). Namun, sebagian besar penelitian tentang Pilkades di Indonesia masih berkonsentrasi pada elemen partisipasi politik, politik uang, mobilisasi elit, perilaku pemilih, dan strategi pemenangan kandidat secara prosedural. Meskipun penting, penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana persepsi publik terhadap kandidat dibentuk dalam hubungan sosial masyarakat desa, bagaimana legitimasi sosial kandidat berubah selama kontestasi, dan mengapa preferensi politik masyarakat dapat berubah secara dinamis seiring dengan perkembangan komunikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Dengan kata lain, penelitian Pilkades masih cenderung melihat masyarakat desa sebagai kumpulan pemilih individu, bukan sebagai komunitas sosial yang secara kolektif membuat dan menyebarkan makna politik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa studi politik lokal memiliki keterbatasan epistemologis karena terlalu menekankan aspek administratif-elektoral. Namun, mereka masih belum cukup mampu memahami dinamika sosial di balik perubahan orientasi politik masyarakat desa. Dalam realitas empiris masyarakat desa, preferensi politik tidak selalu berkembang secara konsisten; sebaliknya, mereka dapat berubah sesuai dengan perkembangan komunikasi sosial, pengaruh elit lokal, hubungan interpersonal, pengalaman

kolektif masyarakat, dan persepsi publik tentang figur kandidat. Loyalitas politik masyarakat semakin berubah, dan konteks relasi masyarakat lokal dan komunikasi sosial sangat mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu lokal Indonesia (Sakinah & Supratiwi, 2026; Hawing, 2025).

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku politik (political behavior) yang dikembangkan oleh Downs (1957) dan diperkaya dengan perspektif komunikasi politik serta legitimasi sosial. Teori perilaku politik menjelaskan bahwa pilihan politik individu dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, sedangkan pendekatan komunikasi politik dan legitimasi sosial menekankan pentingnya interaksi sosial, kedekatan emosional, jaringan sosial, serta persepsi masyarakat dalam membentuk dukungan politik. Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang erat, orientasi politik masyarakat tidak hanya dibentuk oleh kalkulasi rasional, tetapi juga oleh proses komunikasi dan pengakuan sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, teori perilaku politik, komunikasi politik, dan legitimasi sosial digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan dinamika persepsi pemilih dalam Pilkada Desa Sepakat Bersatu Tahun 2026.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis karena sebagian besar penelitian Pilkada di Indonesia masih berfokus pada aspek administratif dan prosedural, seperti partisipasi politik, perilaku memilih, politik uang, dan strategi pemenangan kandidat. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana komunikasi sosial, hubungan interpersonal, dan legitimasi sosial memengaruhi perubahan preferensi politik masyarakat desa masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika persepsi pemilih dalam Pilkada serta memperkaya kajian politik lokal, khususnya terkait proses pembentukan legitimasi politik dalam masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini akan menyelidiki dinamika persepsi pemilih dalam Pilkada Desa Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo Tahun 2026 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Tetapi metode survei yang digunakan dalam penelitian ini tidak semata-mata digunakan untuk menghitung perilaku pemilihan secara statistik; itu juga digunakan untuk menggambarkan pola persepsi sosial masyarakat terhadap kandidat dan menjelaskan dinamika perubahan orientasi politik yang berkembang di ruang sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, survei dianggap bukan sekadar alat untuk mengukur hasil pemilihan, sebaliknya, itu digunakan sebagai metode empiris untuk mempelajari bagaimana komunikasi sosial, interaksi antar kandidat, pengaruh tokoh lokal, dan perubahan dalam preferensi politik masyarakat desa berkorelasi satu sama lain.

Ekplorasi ilmiah ini berangkat dari asumsi bahwa kombinasi faktor rasional, sosial, relasional, dan komunikatif mempengaruhi perilaku memilih masyarakat desa. Oleh karena itu, orientasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh program pembangunan kandidat; itu juga dipengaruhi oleh tingkat komunikasi sosial, interaksi interpersonal, gambaran pribadi kandidat, dampak lingkungan sosial, dan persepsi masyarakat terhadapnya. Dalam konteks ini, perubahan preferensi politik masyarakat dianggap sebagai refleksi dari proses produksi legitimasi sosial dalam kehidupan masyarakat desa, bukan hanya fluktuasi elektoral biasa. Interaksi sosial dan ruang komunikasi yang berkembang dalam komunitas sosial semakin memengaruhi opini politik masyarakat, menurut penelitian terbaru tentang pengaruh media sosial dan komunikasi digital terhadap perilaku memilih (Akbar et al., 2026).

Dalam konteks akademik, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi teoritik dan praktis pada tiga topik utama. Pertama, penelitian ini mengeksplorasi perilaku memilih dalam konteks demokrasi desa dengan menganalisis dinamika persepsi pemilih melalui survei kuantitatif. Kedua, memberikan penjelasan praktis tentang bagaimana komunikasi sosial, interaksi interpersonal, dan perubahan preferensi politik masyarakat desa berkorelasi satu sama lain. Ketiga, mendefinisikan Pilkada sebagai lebih dari sekadar kompetisi politik. Pada akhirnya, penelitian ini menyatakan bahwa analisis dinamika politik desa memerlukan lebih dari hanya pendekatan administratif dan *behaviorisme* elektoral klasik. Pilkada bukan sekadar proses demokrasi lokal untuk memilih pemimpin desa, itu adalah arena sosial di mana legitimasi politik dibuat, dibahas, dan ditukar dalam hubungan sehari-hari masyarakat desa. Dari sudut pandang ini,

perubahan dalam preferensi politik masyarakat menunjukkan perubahan dalam dukungan elektoral dan proses pembuatan makna politik dalam kehidupan masyarakat lokal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis persepsi publik, perilaku politik, dan preferensi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan pada Februari–April 2026 sesuai dengan tahapan Pilkades sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi politik aktual. Populasi penelitian terdiri atas seluruh pemilih tetap (DPT) Desa Sepakat Bersatu yang berjumlah 965 orang dan tersebar di tiga dusun. Untuk menghindari bias dan meningkatkan representasi data, teknik *simple random sampling* digunakan agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden (Wolf et al., 2025). Jumlah sampel penelitian ditetapkan sebanyak 110 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan sekitar 7–8%. Sampel didistribusikan secara proporsional, yaitu 47 responden (43%) dari Dusun Kembang Sari, 36 responden (33%) dari Dusun Giri Rejo, dan 27 responden (24%) dari Dusun Kodra Jadi Mulya. Selain sebaran geografis, penelitian juga mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan latar belakang pekerjaan responden. Pengumpulan data dilakukan melalui survei tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur yang didukung oleh observasi lapangan dan dokumentasi. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert, ordinal, dan nominal untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kandidat, partisipasi politik, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan memilih. Sebelum digunakan, instrumen diuji untuk memastikan kejelasan pertanyaan dan konsistensi jawaban responden (Saris & Revilla, 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan bantuan perangkat lunak statistik untuk menggambarkan distribusi frekuensi, tingkat partisipasi politik, persepsi masyarakat terhadap kandidat, dan kecenderungan perilaku memilih. Hasil analisis diinterpretasikan secara substantif untuk menjelaskan perilaku politik masyarakat desa (Field, 2024). Keabsahan data diuji melalui uji validitas menggunakan korelasi item-total dan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi internal instrumen penelitian. Selain itu, pengendalian kualitas lapangan dilakukan melalui pengawasan enumerator, pengecekan ulang kuesioner, dan verifikasi data responden guna meminimalkan kesalahan pengukuran.

## PEMBAHASAN

### Preferensi Pemilih Desa Bersifat Dinamis dan Tidak Stabil

Dalam beberapa minggu menjelang pemungutan suara Pilkades Desa Sepakat Bersatu Tahun 2026, dinamika dukungan politik masyarakat bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara konvensional. Saat kontestasi hampir berakhir, kandidat yang pada awalnya dianggap memiliki mayoritas suara kehilangan dukungan. Sebaliknya, kandidat yang sebelumnya dianggap tidak kompetitif mulai mendapatkan legitimasi melalui kedekatan sosial yang semakin kuat dengan masyarakat. Sangat menarik bahwa perubahan tersebut tidak terjadi di ruang demokrasi formal, seperti diskusi program atau pembentukan organisasi politik yang formal. Sebaliknya, perubahan tersebut terjadi melalui percakapan informal antarwarga, hubungan keluarga, pengaruh tokoh lokal, pengalaman emosional masyarakat, dan bahkan penilaian sehari-hari terhadap sifat kandidat dalam kehidupan sosial desa.

Pada titik ini, Pilkades tampaknya tidak lagi berfungsi sebagai arena elektoral yang teratur dan konsisten; sebaliknya, itu tampak seperti ruang sosial yang tidak jelas, ambigu, dan terus berubah sesuai dengan dinamika hubungan masyarakat. Menurut hasil survei, meskipun partisipasi politik masyarakat sangat tinggi (93,1% responden menyatakan bahwa mereka pasti akan memilih), preferensi politik masyarakat masih belum stabil (Polmetrik Indonesia, 2026). Sebanyak 48% responden masih merahasiakan pilihan mereka, 11,9% masih belum memutuskan, dan 27,7% masih ragu terhadap kandidat yang akan dipilih. Bahkan, pilihan kedua, yang memungkinkan perpindahan dukungan menjelang

pemungutan suara, masih dimiliki oleh sekitar 60,3% orang yang mendaftar.

Fakta ini menunjukkan bahwa pemilih desa “mudah berubah”. Penjelasan seperti itu terlalu sederhana dan mengabaikan bagaimana hubungan demokrasi desa bekerja. Pilkades Sepakat Bersatu menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat tidak pernah menjadi keputusan akhir individu sebelum pemungutan suara. Interaksi sosial yang berkelanjutan di dalam komunitas membentuk pilihan politik. Orientasi politik masyarakat dibentuk oleh percakapan informal, perubahan persepsi moral terhadap kandidat, validasi sosial antarwarga, dan dinamika komunikasi sehari-hari. Ini adalah saat di mana gagasan utama dari teori perilaku pemilih mulai kehilangan relevansinya. Menurut teori pemilihan rasional klasik, pemilih adalah orang yang rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi kepentingan individu yang relatif stabil (Downs, 1957). Meskipun demikian, kehidupan nyata Pilkades Sepakat Bersatu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sampai tahap akhir kompetisi electoral, teori tentang electoral behavior yang ada tidak dapat menjelaskan bagaimana preferensi voters dalam democracia desa tetap bergantung pada hubungan dan perjanjian sosial. Proses sosial yang dinegosiasikan melalui hubungan interpersonal dan pengalaman kolektif masyarakat adalah sumber preferensi politik masyarakat desa. Dalam situasi ini, pilihan politik menunjukkan bagaimana program kandidat dinilai dan bagaimana masyarakat melihat figur kandidat dalam kehidupan sosial.

Masyarakat desa tidak hanya bertanya siapa yang mampu membangun desa, tetapi juga siapa yang dianggap hadir dalam kehidupan masyarakat, memahami masalah masyarakat, mudah diakses, dan memiliki ikatan emosional dengan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat desa lebih tepat dipahami sebagai preferensi pemilih yang dinegosiasikan secara hubungan, yaitu preferensi politik yang dihasilkan melalui validasi komunitas dan negosiasi sosial. Bukan hanya kalkulasi rasional individu.

## Hubungan Sosial Membentuk Persepsi Publik dan Pilihan Politik

Jika preferensi politik masyarakat desa tidak stabil, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana masyarakat umum melihat Pilkades? Studi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial memiliki peran yang jauh lebih penting daripada mekanisme resmi demokrasi. Faktor utama dalam membentuk persepsi publik adalah rekam jejak kepemimpinan, yang mencapai 40%, diikuti oleh reputasi moral kandidat dan pengaruh informasi media, masing-masing 25% dan 15%. Namun, angka-angka tersebut tidak dapat dipahami dalam konteks statistik atau administratif. Pengalaman sosial masyarakat desa dengan kandidat adalah yang lebih penting. Dalam pandangan teknokratis, rekam jejak kandidat tidak dipahami dengan baik karena teori accountability kontemporer menempatkan prestasi birokratik dan pencapaian administratif sebagai dasar legitimasi politik. Sebaliknya, masyarakat desa menilai kandidat berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka dengan masyarakat, apakah kandidat mudah ditemukan ketika warga mengalami masalah, membantu masyarakat dalam situasi tertentu, atau memiliki hubungan interpersonal yang dianggap tulus. Integritas dianggap sebagai elemen penting dalam kepemimpinan desa oleh 80% peserta survei.

Di sini, yang dinilai oleh masyarakat bukan hanya kemampuan kandidat untuk “mengelola desa”, tetapi juga bagaimana mereka dipandang secara moral oleh masyarakat. Legitimasi politik berasal dari pengalaman sosial kolektif yang membentuk kepercayaan dalam masyarakat desa, bukan dari proses demokrasi formal. Kepercayaan politik dalam demokrasi desa berasal dari pengakuan komunal dan interaksi sosial sehari-hari. Teori legitimasi kelembagaan yang berlaku saat ini meremehkan proses ini. Masyarakat tidak dapat dengan jelas membedakan kualitas politik kandidat dan sifat pribadinya dalam Pilkades Sepakat Bersatu. Sumber utama legitimasi kepemimpinan politik adalah moralitas pribadi, kedekatan sosial, dan pengalaman interpersonal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi desa menghasilkan legitimasi relasional. Kandidat yang dianggap “mampu” juga menerima dukungan politik. Di sinilah Pilkades menunjukkan aspek filosofis yang sering diabaikan dalam pendekatan behavioristik-elektoral klasik: politik lokal pada dasarnya merupakan tempat pengakuan sosial, atau pengakuan sosial, daripada persaingan administratif formal.

Tampaknya relasi sosial juga menentukan bagaimana informasi politik dilegitimasi. Meskipun media berkontribusi pada pembentukan persepsi publik, pengaruh mereka tidak langsung. Jaringan sosial lokal seperti keluarga, tokoh masyarakat, kelompok pertemanan, dan percakapan informal warga membuat informasi politik baru bermakna. Dalam situasi ini, legitimasi informasi politik bergantung pada kredibilitas hubungan daripada hanya paparan media.

Hasil ini secara langsung mengubah keyakinan tentang sudut pandang media-centric dalam teori komunikasi politik, yang menganggap media formal sebagai pihak utama yang membentuk opini publik (McCombs & Shaw, 1972). Media sosial bukan tempat utama untuk menghasilkan makna politik di desa. Percakapan informal di warung kopi, kelompok pengajian, hubungan keluarga, dan ruang sosial komunitas lainnya adalah cara politik lokal berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas perspektif komunikasi politik melalui gagasan infrastruktur komunikasi politik yang tertanam, yaitu struktur komunikasi politik yang berfungsi dan berfungsi melalui jaringan sosial informal masyarakat desa. Ruang publik desa dalam konteks ini tidak seperti ruang publik liberal-modern yang abstrak dan impersonal. Sebaliknya, ruang publik desa sangat intim, dekat, dan sangat personal. Hubungan sosial yang ada dalam komunitas sehari-hari membentuk politik. Karena itu, konteks desa Indonesia harus dipahami tidak hanya sebagai lokasi penelitian empiris tetapi juga sebagai ruang teoritis yang menunjukkan bagaimana hubungan sosial yang kuat mendukung demokrasi lokal di Global South.

## **Pendekatan Behavioristik-Elektoral Klasik Tidak Cukup Menjelaskan Pilkades**

Di Indonesia, pendekatan behavioristik-elektoral yang terlalu prosedural dan administratif masih mendominasi penelitian Pilkades. Seringkali, fokus utama diarahkan pada faktor-faktor seperti partisipasi pemilih, strategi kampanye, politik uang, dan tingkat elektabilitas kandidat. Metode ini sangat penting untuk melihat aspek prosedur demokrasi lokal. Namun, fakta empiris Pilkades Sepakat Bersatu menunjukkan bahwa metode tersebut mulai kehilangan kejelasannya ketika berhadapan dengan dinamika sosial yang lebih kompleks dalam masyarakat desa. Kalkulasi rasional individu tidak dapat menjadi alasan pilihan politik masyarakat desa. Pengalaman sosial, legitimasi moral, komunikasi informal, dan hubungan interpersonal yang hidup di komunitas lokal adalah cara politik desa bekerja. Teori-teori pemilihan saat ini gagal menjelaskan bagaimana signifikansi politik dalam demokrasi desa dibangun secara sosial melalui kedekatan emosional, interaksi relasional, dan validasi komunal. Pilkades dalam situasi ini tidak hanya tempat untuk memberikan suara, tetapi juga tempat interpretasi di mana masyarakat secara kolektif membuat makna politik.

Tidak hanya sulit untuk memahami pilihan politik masyarakat desa dari perspektif teori behavioristik, tetapi juga asumsi epistemologis yang mendasarinya. Pendekatan behavioristik-elektoral cenderung menganggap bahwa variabel-variabel yang dapat diukur, stabil, dan dapat diprediksi adalah komponen utama dari situasi politik. Meskipun demikian, kenyataan dalam Pilkades menunjukkan hal yang sebaliknya, preferensi pemilih berubah dengan cepat, legitimasi kandidat diperdebatkan secara sosial, dan orientasi politik masyarakat terus berubah sesuai dengan perubahan dalam hubungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan celah besar dalam demokrasi yang berpusat pada pemerintah dan electoralism proses, yang terlalu menempatkan institusi formal sebagai pusat utama demokrasi lokal. Faktanya, pengalaman sosial membentuk orientasi politik masyarakat desa lebih banyak daripada proses formal demokrasi. Pemilih mempertimbangkan bukan hanya kemampuan teknis kandidat tetapi juga bagaimana mereka digambarkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan yang lebih besar bahwa masyarakat desa mempertimbangkan rasionalitas saat memutuskan apa yang harus dilakukan. Infrastruktur adalah masalah paling penting, dengan 86,1% responden menyatakan bahwa itu adalah masalah yang paling mendesak bagi desa dan 60,4% menyatakan bahwa itu akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan lima tahun ke depan. Tetapi rasionalitas tidak dapat menggantikan hubungan yang sudah ada di masyarakat desa. Justru pertemuan antara legitimasi sosial-relasional dan rasionalitas programatik yang terjadi.

Fenomena tersebut menantang teori modernisasi, yang menganggap perkembangan politik sebagai pergeseran linear dari politik tradisional ke politik rasional-modern. Dalam konteks Pilkadaes Sepakat Bersatu, modernisasi politik tidak menghapus hubungan sosial desa; sebaliknya, itu berkembang bersama-sama dengan hubungan tersebut. Politik desa muncul dari kombinasi rasionalitas hubungan, yaitu evaluasi rasional terhadap program pembangunan dan legitimasi sosial yang diperoleh melalui hubungan interpersonal masyarakat desa.

## Demokrasi Desa sebagai Arena Produksi Legitimasi Sosial

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkadaes Desa Sepakat Bersatu bukan hanya proses administrasi untuk memilih kepala desa. Sebenarnya, itu menciptakan legitimasi sosial dalam komunitas lokal. Pengalaman sosial, komunikasi informal, hubungan emosional, dan pengakuan moral yang terus diperdebatkan dalam kehidupan sehari-hari warga desa adalah sumber utama dukungan politik masyarakat. Hasil pendahuluan mempertanyakan kecenderungan studi Pilkadaes yang terlalu behavioristik, prosedural, dan berpusat pada negara. Penemuan ini secara langsung menjawab masalah utama ini. Karena mereka masih terlalu procedural, individualistik, dan berpusat pada institusi, beberapa pilihan teori mengabaikan sifat hubungan demokrasi desa. Dalam masyarakat desa, legitimasi politik timbul bukan hanya dari kemenangan dalam pemilihan formal, tetapi juga dari pengakuan sosial masyarakat terhadap kandidat yang dianggap memiliki legitimasi moral dan hubungan dengan komunitas mereka.

Saat ini, demokrasi desa menunjukkan sifat filosofisnya yang paling fundamental. Politik lokal bukan hanya tempat di mana kekuasaan dibagi, tetapi juga tempat di mana masyarakat menciptakan persepsi kolektif tentang siapa yang layak memimpin komunitas mereka. Pilkadaes bukan hanya tentang memilih seorang kepala desa, itu juga tentang membangun makna kolektif tentang kepemimpinan, kedekatan sosial, dan legitimasi moral. Penelitian ini membangun kembali pemahaman kita tentang demokrasi desa dengan menggunakan cara yang lebih relasional dan interpretatif. Dalam penelitian ini, *democracia* desa diubah menjadi tempat untuk menghasilkan legitimasi hubungan bukan sebagai proses pemilihan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, demokrasi desa menghasilkan makna politik melalui hubungan sosial, pengalaman kolektif, komunikasi informal, dan komunikasi. Temuan ini memiliki konsekuensi teoritis yang lebih luas dalam konteks *Global South*.

Desa Indonesia bukan hanya lokasi penelitian nyata, tetapi juga ruang teoritis yang menunjukkan bahwa demokrasi lokal dapat berhasil melawan keyakinan liberal-individualistik yang mendominasi teori demokrasi Barat saat ini. Politik lokal di masyarakat desa di Indonesia sangat terkait, berbasis moral, dan dinegosiasikan secara komunal. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya menambahkan lebih banyak kasus tentang Pilkadaes di Indonesia, itu juga mengubah cara kita melihat demokrasi lokal, legitimasi politik, dan perilaku memilih dari perspektif behavioristik ke perspektif yang didasarkan pada pengalaman sosial masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkadaes Desa Sepakat Bersatu tidak hanya merupakan mekanisme administratif untuk memilih kepala desa, tetapi juga menjadi arena pembentukan legitimasi sosial dalam masyarakat. Dukungan politik masyarakat dibentuk melalui komunikasi informal, hubungan emosional, pengalaman kolektif, dan pengakuan moral terhadap kandidat dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan behavioristik dan prosedural belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika demokrasi desa. Legitimasi politik di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kemenangan formal dalam pemilihan, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap figur yang dianggap memiliki kedekatan dan legitimasi moral. Dengan demikian, Pilkadaes merupakan ruang pembentukan makna kolektif mengenai kepemimpinan dan demokrasi lokal. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi desa di Indonesia memiliki karakter yang relasional, berbasis moral, dan dinegosiasikan secara komunal. Temuan ini tidak hanya memperkaya kajian Pilkadaes di Indonesia, tetapi juga

memberikan perspektif alternatif terhadap teori demokrasi dan perilaku memilih yang selama ini didominasi oleh pendekatan liberal-individualistik.

## REFERENSI

- Akbar, M. J., Firmansyah, R. A., Muamalah, R., & Hakim, M. F. (2026). Comparison of social media use in its influence on voter behavior in Indonesia and the Philippines. *Publique*, 7(1).  
<https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/publique/article/view/1542/617>
- Amalia, D. R., Hidayat, R., Mulka, S. R., Burhan, R., & Mulawarman, M. (2025). Campaign strategies and social network dynamics: Unveiling the victory of candidates in the 2024 legislative election in Kolaka Regency, Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(3), 361–372.  
<https://doi.org/10.52970/grdis.v5i3.1552>
- Bevir, M. (2023). *Interpretive social science: An anti-naturalist approach*. Oxford University Press.  
<https://global.oup.com/academic/product/interpretive-social-science-9780192857435>
- Bosco, A., & Verney, S. (2020). From electoral epidemic to government epidemic: The next level of the populist revolt. *Government and Opposition*, 55(4), 517–537. <https://doi.org/10.1017/gov.2019.18>
- Bryman, A. (2024). *Social research methods* (6th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (6th ed.). Sage Publications.
- Hawing, H. (2025). Political preferences and local elections: Case study of the 2024 Makassar mayoral election. *Journal of Contemporary Local Politics*.  
<https://journal.ppishk.org/index.php/jclp/article/view/716>
- JambarPost. (2026). Data daftar pemilih tetap Pilkades Desa Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo Tahun 2026.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- MitraMabes. (2026). Penetapan nomor urut calon kepala desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2026.
- Moffitt, B. (2022). Populism and the “post-truth” moment: How we got into this mess, and how we might get out of it. *Critical Review*, 34(1–2), 161–184.  
<https://doi.org/10.1080/08913811.2022.2060907>
- Muliani, M., Abdurrahman, A., & Rifaid, R. (2026). Celebrity politicians: Political legitimacy in the 2024 election in Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, 8(1).  
<https://doi.org/10.47650/jglp.v8i1.2299>
- Nasir, M. (2026). Understanding voter behavior in direct local elections. *Frontiers in Political Science*.  
<https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1754738>
- Pahrudin, H. M., Elviria, S., Supriyanto, S., Lestari, L., Elsi, S. D., & Tsauro, M. A. (2026). The dynamics of policy communication and electability: A case study of M. Syukur in the 2024 Merangin regional elections. *Journal of Society and Media*, 10(1), 202–223.  
<https://doi.org/10.26740/jsm.v10n1.p202-223>
- Polmetrik Indonesia. (2026). Survei dinamika preferensi pemilih Pilkades Desa Sepakat Bersatu Tahun 2026. Polmetrik Indonesia.
- Revilla, M., Ochoa, C., & Loewe, G. (2024). Survey research in the digital era: Challenges and methodological innovations. *International Journal of Social Research Methodology*, 27(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/13645579.2023.2181234>

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2025

- Sakinah, N., & Supratiwi. (2026). Shifts in voter behavior and the electoral challenges facing PKB in the 2024 Demak local election. *Sosioedukasi*, 15(1). <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7207>
- Saris, W. E., & Revilla, M. (2023). Questionnaire design, testing and survey quality. *Social Indicators Research*, 168(1), 15–33. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03112-7>
- Wolf, C., Joye, D., Smith, T. W., & Fu, Y. C. (2025). *The SAGE handbook of survey methodology* (2nd ed.). Sage Publications.
- Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (2014). *Interpretation and method: Empirical research methods and the interpretive turn* (2nd ed.). Routledge.